

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, S. S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Pada PT. Nenggrapratama Internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2).
- Indonesia, P. R. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Keuangan, K. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan No. 65/KMK.04/2007 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan*. Jakarta.
- Keuangan, K. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*. Jakarta.
- Keuangan, K. (2021). *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu Yang Dimilik*. Jakarta.
- Keuangan, K. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*. Jakarta.

- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Malvin, S. (2012). *Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT. Welgrow Indopersada)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan* (Edisi Revisi ed.). Yogyakarta: Andi.
- Pajak, D. J. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto*. Jakarta.
- Pajak, D. J. (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 33/PJ/2013 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi (freight charges)*. Jakarta.
- Perhubungan, K. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan*. Jakarta.
- Pohan, C. A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, C. A. (2017). Evaluasi Pemajakan Atas Nilai Tambah Dalam Biaya Angkutan Laut dan Udara (Freight) Kargo Pada Perusahaan Freight Forwarding di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Sandag, K. . (2017). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Soemarso, S. (2003). *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jilid Ke-1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Steven. (2014). *Freight Forwarder dan profil perusahaan PT. Lintas Manunggal Sejahtera. (Nelson, Interviewer)* (Cohen, L. Quality function deployment: How to make QFD work of you ed.). New York: Publishing Company, 1995.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Rajawali.
- Warman. (2017). *Manajemen Pergudangan*. Jakarta: PT Puka Sinar Harapan.